

## BAB IV

### TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP ICMI

#### A. TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP ICMI

Semenjak era 1990-an, tahun kelahiran ICMI, posisi dan peran organisasi ini sudah ramai diperdebatkan orang dari berbagai sudut pandang Idiologi, Politik, Ekonomi, maupun Sosial-Budaya. Walhasil, ICMI tampil menjadi organisasi massa yang paling disorot, dicurigai, sekaligus diharapkan.

Merujuk pada tanggapan masyarakat yang beraneka ragam, Dr. Kuntowijoyo dengan kritis mengelompokkan mereka menjadi tiga golongan, berdasarkan sikap pandang mereka terhadap ICMI. Pertama, yang menaruh harapan; kedua, meragukan; ketiga melihat ICMI sebagai ancaman<sup>143</sup>. Sebagai ahli sejarah - penulis yakin - Kuntowijoyo cukup objektif dengan pengelompokan ini, apalagi disana dicantumkan juga kelompok yang suka maupun yang tidak suka, maka dari itu tidak ada salahnya penulis merujuk pada pengelompokan itu untuk mempermudah pemilah-pilahannya dalam tulisan ini.

-----  
143. Kuntowijoyo, "ICMI, Mobilitas Sosial Dan Demokratisasi", *Republika*, 5 Desember 1995

## 1. Reaksi Positif (Mereka yang menaruh harapan)

Mereka itu kebanyakan generasi tua, yang mengalami pahit getirnya Islam sebagai Agama kaum pinggiran, golongan ini terbagi menjadi tiga :

- a. Yang berpandangan da'wah, seperti Ormas Sosial keagamaan MUI, DDI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Sejak awal ormas-ormas ini sudah mendukung, sebab ICMI dipandang mampu melengkapi bidang yang belum dapat mereka sentuh. Misalnya: Bidang kecendekiawanan, terutama Muhammadiyah, sejak ICMI berdiri kaum cendekiawan-nya berbondong-bondong menjadi anggota ICMI, bahkan rencana untuk membentuk Ikatan Cendekiawan Muhammadiyah digagalkan untuk diintegrasikan kedalam ICMI. Sementara NU perlu menjadi catatan khusus, walaupun beberapa orang penting NU menjadi pengurus ICMI, Yusuf Hasyim misalnya, namun ketua NU Abdurrahman Wachid menjaga jarak dengan ICMI malah NU terkesan berseberangan dengan ICMI.<sup>144</sup> Ulii Abshor Abdullah, aktifis Forum Komunikasi Generasi Muda NU (FKGMNU) dan LAKPESDAM NU Jakarta. Menilai kesan itu tidak benar sebab terjadinya ketegangan hanya dikalangan elit saja. <sup>145</sup>

---

144. *Panji Masyarakat*, no. 669, 21 Desember 1990

145. *mmat*, no. 12, tahun I, 11 Desember 1995 hal. 25

## 1. Reaksi Positif (Mereka yang menaruh harapan)

Mereka itu kebanyakan generasi tua, yang mengalami pahit getirnya Islam sebagai Agama kaum pinggiran, golongan ini terbagi menjadi tiga :

- a. Yang berpandangan da'wah, seperti Ormas Sosial keagamaan MUI, DDI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Sejak awal ormas-ormas ini sudah mendukung, sebab ICMI dipandang mampu melengkapi bidang yang belum dapat mereka sentuh. Misalnya: Bidang kecendekiawanan, terutama Muhammadiyah, sejak ICMI berdiri kaum cendekiawan-nya berbondong-bondong menjadi anggota ICMI, bahkan rencana untuk membentuk Ikatan Cendekiawan Muhammadiyah digagalkan untuk diintegrasikan kedalam ICMI. Sementara NU perlu menjadi catatan khusus, walaupun beberapa orang penting NU menjadi pengurus ICMI, Yusuf Hasyim misalnya, namun ketua NU Abdurrahman Wachid menjaga jarak dengan ICMI malah NU terkesan berseberangan dengan ICMI.<sup>144</sup> Ulii Abshor Abdullah, aktifis Forum Komunikasi Generasi Muda NU (FKGMNU) dan LAKPESDAM NU Jakarta. Menilai kesan itu tidak benar sebab terjadinya ketegangan hanya dikalangan elit saja. <sup>145</sup>

---

144. *Panji Masyarakat*, no. 669, 21 Desember 1990

145. *mmat*, no. 12, tahun I, 11 Desember 1995 hal. 25

- b. Yang berpandangan Agama, golongan ini terdiri dari orang awam yang melihat ICMI sebagai sarana peningkatan peran sosial umat, terutama peran agama, golongan ini sudah akan puas dengan maraknya agama dimana-mana, da'wah yang bebas, dukungan birokrasi dalam kegiatan agama, banyaknya Birokrat yang beragama Islam. Mereka lebih percaya pada wacana yang berbentuk riil yang visual, bukan yang bersifat teoritis dan konseptual yang hanya menghiasi forum-forum ilmiah. Mereka ini jumlahnya paling banyak.
- c. Yang berpandangan politik, yaitu mereka yang mengharapkan peran politik ICMI, secara akomodatif ketengah percaturan politik nasional. Mereka menganggap bila umat mayoritas tampil menguat dipercaturan politik bangsa itu wajar dan proporsional. Ibrahim G. Zakir memperjelas kelompok ini dengan mengatakan : "Harap maklum, jika dalam masa proses kelahiran ICMI, nyaris seluruh elemen dalam masyarakat Islam seia sekata mendukung ICMI", lebih lanjut dia mengatakan "Sudah waktunya mengikutsertakan pemikir yang lahir dari kalangan umat Islam"<sup>146</sup> Orang-orang yang berpandangan sesuai dengan inilah kira-kira yang termasuk kelompok ini.

---

146. Ibrahim G. Zahiri, ICMI Politik Dan Politik ICMI, *Editor*, no. 23, 16 Februari 1991

- b. Yang berpandangan Agama, golongan ini terdiri dari orang awam yang melihat ICMI sebagai sarana peningkatan peran sosial umat, terutama peran agama, golongan ini sudah akan puas dengan maraknya agama dimana-mana, da'wah yang bebas, dukungan birokrasi dalam kegiatan agama, banyaknya Birokrat yang beragama Islam. Mereka lebih percaya pada wacana yang berbentuk riil yang visual, bukan yang bersifat teoritis dan konseptual yang hanya menghiasi forum-forum ilmiah. Mereka ini jumlahnya paling banyak.
- c. Yang berpandangan politik, yaitu mereka yang mengharapkan peran politik ICMI, secara akomodatif ketengah percaturan politik nasional. Mereka menganggap bila umat mayoritas tampil menguat dipercaturan politik bangsa itu wajar dan proporsional. Ibrahim G. Zakir memperjelas kelompok ini dengan mengatakan : "Harap maklum, jika dalam masa proses kelahiran ICMI, nyaris seluruh elemen dalam masyarakat Islam seia sekata mendukung ICMI", lebih lanjut dia mengatakan "Sudah waktunya mengikutsertakan pemikir yang lahir dari kalangan umat Islam"<sup>146</sup> Orang-orang yang berpandangan sesuai dengan inilah kira-kira yang termasuk kelompok ini.

---

146. Ibrahim G. Zahiri, ICMI Politik Dan Politik ICMI, *Editor*, no. 23, 16 Februari 1991

- b. Yang berpandangan Agama, golongan ini terdiri dari orang awam yang melihat ICMI sebagai sarana peningkatan peran sosial umat, terutama peran agama, golongan ini sudah akan puas dengan maraknya agama dimana-mana, da'wah yang bebas, dukungan birokrasi dalam kegiatan agama, banyaknya Birokrat yang beragama Islam. Mereka lebih percaya pada wacana yang berbentuk riil yang visual, bukan yang bersifat teoritis dan konseptual yang hanya menghiasi forum-forum ilmiah. Mereka ini jumlahnya paling banyak.
- c. Yang berpandangan politik, yaitu mereka yang mengharapkan peran politik ICMI, secara akomodatif ketengah percaturan politik nasional. Mereka menganggap bila umat mayoritas tampil menguat dipercaturan politik bangsa itu wajar dan proporsional. Ibrahim G. Zakir memperjelas kelompok ini dengan mengatakan : "Harap maklum, jika dalam masa proses kelahiran ICMI, nyaris seluruh elemen dalam masyarakat Islam seia sekata mendukung ICMI", lebih lanjut dia mengatakan "Sudah waktunya mengikutsertakan pemikir yang lahir dari kalangan umat Islam"<sup>146</sup> Orang-orang yang berpandangan sesuai dengan inilah kira-kira yang termasuk kelompok ini.

-----

146. Ibrahim G. Zahiri, ICMI Politik Dan Politik ICMI, *Editor*, no. 23, 16 Februari 1991

Mereka cenderung melihat ICMI dari kaca mata

politik, dan menyimpulkan bahwa ICMI sebagai hasil kooptasi

negara atas umat, mereka juga terdiri dari tiga golongan :

a. Relatif pasif, mereka tidak setuju dengan ICMI, namun

membicarakan ICMI beraktifitas, mereka antara lain berpen-

dapat bahwa "ICMI tidak mampu memenuhi tarifnya untuk

komponen adaptasi *problem-problem* masyarakat kelas

bawah, *semisal* kasus *kegiatan* yang sudah dipertanyakan.

## 2. Reaksi Skeptik (Orang Islam yang meragukan kehadiran ICMI)

Meraka cenderung melihat ICMI dari kaca mata politik, dan menyimpulkan bahwa ICMI sebagai hasil kooptasi negara atas Umat, meraka juga terdiri dari tiga golongan :

- a. Relatif pasif, meraka tidak setuju dengan ICMI, namun membiarkan ICMI beraktivitas, meraka antara lain berpen- dapat bahwa "ICMI tidak mampu memenuhi janjinya untuk menanggung aspirasi problem-problem masyarakat kelas bawah, semisal kasus kedua Ombu", Afnun Nadjib<sup>147</sup> ICMI organisasi yang tidak mandiri, betapa tidak ? ketuanya jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, yang saya inginkan, masyarakat itu mandiri dan organisasi masyarakat juga mandiri", Dalfar Noer<sup>148</sup> "ICMI lebih mengutamakan badan dari pada roh, saya tidak menganut aliran badan tapi roh, karena yang dibentuk badan, meraka akan berhadapan dengan struktur, akibatnya tenaga intelektual yang ada menjadi mubadzir", Ridwan Saidi<sup>149</sup> Dalam kelompok ini ada pula yang setuju dengan ICMI tapi lebih baik berada diluar organisasi agar dapat bertindak bebas, seperti M.

147. Afnun Nadjib, Janji Cendekiawan Muslim, dalam

Nasrulloh Ali Fauzi (editor), ICMI, Antara Atatus Quo dan demokratisasi, Mizan, Bandung, 1995, hal. 287

148. Panji Masyarakat, no. 669, 21 Desember 1990

149. Tempo, 13 April 1991, hal. 24

Billah, Taufik Abdullah, Rusli Karim dan lain-lain.

- b. Yang Agresif, selalu mengkritik ICMI dimana-mana sampai diluar negeri, misalnya K.H. Abdurrahman Wachid, materi kritiknya juga menyangkut beberapa masalah yang menggu-  
gat ICMI; misalnya, "Intelektualitas tidak bisa diukur dengan lembaga" dan "Kreatifitas berfikir bersifat person bukan lembaga"<sup>150</sup> "ICMI adalah organisasi yang eksklusif"<sup>151</sup> "ICMI menumbuhkan sektarianisme", "Saya bekerja untuk masyarakat Indonesia, tak hanya demi Islam"<sup>152</sup> Lebih jauh Gus Dur menjelaskan, "Cendekiawan telah mengelompok di ICMI secara eksklusif bila Islam difungsikan sebagai satu-satunya kebenaran, sementara yang lain harus mengalah"<sup>153</sup> Sampai pendapat terakhir ini dapat disimpulkan bahwa Abdurrahman Wachid memiliki visi pandang yang berseberangan dengan ICMI, hingga pada masalah Islam sebagai satu-satunya panutan kebenaran (pedoman) yang selama ini dipandang mutlak oleh umat Islam digugat pula oleh Gus Dur, bagaimana umat Islam harus menerima pedoman umat non Islam sebagai kebe-  
naran? sebuah perbedaan yang menurut banyak orang tidak perlu dan tidak mungkin dipersatukan.

150. *Tempo*, no. 41, th. XX, 8 Desember 1990

151. *Editor*, no. 14, 15 Desember 1990

152. Robert W. Hefner, *Op-Cit*, hal. 49

153. Abdurrahman Wahid, *Intelektual Ditengah Eksklusifisme*, dalam buku Nasrullah Ali Fauzi (ed.), *Op-Cit*, hal. 70

c. Yang tidak puas pada ICMI karena dipandang tidak Istiqomah. Mereka adalah orang-orang yang melihat bahwa ICMI setelah sekian tahun telah terlalu jauh keluar dari khittahnya. Mereka cenderung memberi saran-saran pada ICMI. Misalnya "ICMI hendaknya kembali kepada gerakan kultural, yang menjadi cita-cita awalnya" Dr.M.A.S Hikam, peneliti LIPI.

### 3. Reaksi negatif (Orang yang melihat ICMI sebagai ancaman)

Mereka terdiri dari dua kelompok yaitu :

- a. Orang-orang yang tidak setuju dengan Islam politik, misalnya ketua umum PDI (saat diwawancarai tahun 1990) H. Soeryadi, tegas-tegas mengatakan, "Saya tidak setuju ! organisasi ini (ICMI) bukan saja tidak perlu, mestinya tidak boleh, bukankah ini primordial"<sup>154</sup> Dibelakangnya terdapat tokoh non Islam, namun mereka cenderung menanggapi dengan bahasa-bahasa halus dan dengan makna tersirat, misalnya Prof.Dr. Franz Magnis Suseno.
- b. Generasi muda yang melihat ICMI sebagai penghalang proses demokratisasi, fenomena munculnya ICMI merupakan sumber politik baru dalam kaitan kekuatan negara dan masyarakat sipil. Bentuk tanggapannya bervariasi, aspek demokratisasi, aspek politik, aspek pembelaan rakyat

---

154. *Tempo*, no. 41, 8 Desember 1990

kecil dan lain-lain. Penyampaiannya ada yang logis - kritis dan ada pula yang tajam-emosional gaya anak muda, pendapat mereka antara lain, "munculnya ICMI memicu munculnya Forum Demokrasi, Ormas-ormas non Islam, dan terakhir PCPP, YKPK. Yang pertama khawatir terhadap robohnya kehidupan demokrasi yang telah dibangun dengan berdirinya ICMI; yang kedua takut kalau tercerabut hak-hak minoritas agama;Ketiga khawatir robohnya sendi kebangsaan kita," Hairus Salim HS<sup>155</sup> "Kepentingan politik ICMI semakin menonjol, karena dikendalikan anggotanya yang memiliki visi politik, akhirnya ICMI semula lakon -Pembaharu- menjadi terpuruk kedalam pertarungan politik" F.B Paskalis Abi<sup>156</sup>"Dalam perkembangannya ICMI seringkali terjebak oleh logika kekuasaan Orde Baru dalam merespon keummatan. Hal ini dapat dilihat ketidakberdayaan ICMI dalam menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan nasib rakyat yang tertindas, tergusur, yang dilakukan oleh negara Orde Baru"<sup>157</sup> Ada pula yang secara transparan menuding keterlibatan Soeharto di ICMI, "Karena pelindung utamanya adalah Soeharto, maka ada kompensasi untuk perlindungan ini, yakni ICMI tidak akan menqutik-utik persoalan yang peka bagi

155. Hairusalim HS, ICMI Pluralisme Agama Dan Demokratisasi, dalam buku Zuli Qodir Dan M. Iqbal Songel(edit.), Op-Cit., hal. 29

156. *I b i d.*, hal. 49

157. *I b i d.*, hal. 96

sang pelindung, kita lihat saja,...Bisnis anak-anak pejabat tinggi yang sudah menggurita, pengurusan yang sudah menjadi rutinitas, kolusi antara pejabat tinggi dengan konglomerat Cina, Suksesi atau penbatasan masa jabatan Presiden, misalnya apa suara resmi ICMI ? "M. Thoriq"<sup>158</sup> Dan masih banyak lagi komentar anak muda terhadap ICMI yang bernada menggugat. Ketidakramahan anak muda itu terjadi, karena secara psikologis kaum muda selalu kurang sabar dan anti kemapanan status Quo, sementara sebadian pengurus ICMI sendiri menilai --mendakui-- kerja ICMI amat lamban dan kurang menyentuh problem rakyat lemah.

## B. ANALISA DAN TANGGAPAN

Tanggapan-tanggapan yang beraneka ragam yang telah terklasifikasi diatas, terutama yang menilai ICMI sedang memainkan manuver politiknya, kalau dianalisa setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemungkinan kondisi seperti itu muncul.<sup>159</sup>

Pertama, ICMI lahir ketika proyek keterbukaan politik sedang diulirkan oleh pemerintah, dalam keadaan ini orang menghubungkan kalahiran ICMI sebagai salah satu pertanda memasuki fase transisi, kran politik yang tadinya

158. *I b i d*, hal 198

159. *Republika*, 4 desember 1995

tersumbat mulai dibuka perlahan, hak-hak individual dan kelompok milik masyarakat mulai didefinisikan ulang dan direhabilitasi.

Konsekwensinya, kelahiran ICMI dipandang sebagai langkah baru pemerintah "Mendekati" Islam yang sebelumnya dicurigai dan berada diluar pagar dunia politik. Maka fenomena ICMI dinilai lebih bernuansa politik ketimbang kultural yang diprogramkan.

**Kedua.** ICMI lahir dengan dukungan tokoh-tokoh birokrasi, apalagi kehadiran Habibie sebagai ketua umumnya dinilai menunjukkan kuatnya kepentingan kalangan birokrasi didalam organisasi ini, maka, keterlibatan organisasi ini dalam peta politik nasionalpun dianggap sebagai sebuah keniscayaan.

**Ketiga.** Informasi-informasi tentang ICMI yang mencuat kepermukaan terutama dalam liputan media massa, adalah "Proyek-proyek Politik ICMI" (atau yang disalah pahami sebagai proyek politik ICMI), sehingga menciptakan opini dimasyarakat keterlibatan ICMI di panggung politik .

**Keempat,** disukai atau tidak, ICMI adalah organisasi besar, dalam usianya yang lima tahun, dengan perkembangan yang luas dalam negeri maupun luar negeri serta dengan programnya yang relatif berkembang. Tak pelak lagi dengan wilayah yang begitu luas ICMI kemudian dianggap memiliki posisi tawar menawar politik yang cukup kuat untuk mengesahkan agenda manuver politiknya.

Kondisi itulah yang mau tidak mau, membuat ICMI

dianggap sebagai aktor yang ikut menentukan perpolitikan Indonesia, dan melahirkan tuduhan bahwa: ICMI terlalu banyak berpolitik, ICMI terkooptasi oleh negara, ICMI tergantung pada Habibie, Primordialisme, Sektarianisme, Elitisme dan lain-lain.

Ketua dewan pakar ICMI, Dr.M. Amin Rais menyatakan sikap rata-rata anggota ICMI tatkala digempur dengan berbagai kritik, meladeninya dengan senyum, percaya diri dan karya nyata. Sementara itu kritik yang konstruktif dan bermanfaat harus diperhatikan oleh ICMI untuk memperbaiki langkah-langkah dimasa datang<sup>160</sup>

Sebenarnya tidak semua kritik itu benar dan realistis. Ada pula yang terlalu ideal dan kurang proporsional. K.H. Mustafa Bisri menyatakan "Ummat itu Banyak, termasuk kepentingan dan keinginannya juga banyak. Jadi, mustahil ICMI bisa menuruti semua keinginan Ummat (semuanya) untuk menyelesaikan masalah-masalahnya", demikian pula tentang isu sektarianisme, dia juga menanggapi bahwa "Sektarianisme itu berpangkal dari nama, yakni cendekiawan dan Muslim, yang berarti yang menjadi anggota harus cendekiawan dan Muslim".<sup>161</sup>

Apabila maksud ICMI sektarian seperti disebutkan diatas maka tidak perlu ditanggapi karena hal itu menyang-

160. M. Amien Rais, Menggempur Ummat, *Republika*, 7 Desember 1995.

161. KH. Musthofa Bisrie, Mustahil ICMI Bisa Penuhi Semua Keinginan Ummat, *Republika*, 4 desember 1995

kut hakekat ICMI yang memang keanggotaannya hanya menampung cendekiawan yang muslim saja, kalau misalnya diminta menampung masyarakat awam atau cendekiawan non-Muslim juga tentu harus membongkar seluruh akar ICMI, terutama nama beserta AD/ARTnya, ini tidak mungkin. Akan tetapi kalau yang dimaksud sektarianisme itu sikap ICMI yang kurang Pluralis maka hal itu sudah dijawab ICMI dengan memprakarsai prasasti "Pernyataan Bersama Cendekiawan Indonesia", pada Agustus 1994, yang diantaranya berbunyi kalimat, "Maka sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kami kan terus menerus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (seutuhnya lihat lampiran V), yang ditandatangani bersama oleh beberapa forum cendekiawan; yaitu Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Keluarga Cendekiawan Budhis Indonesia (KCBBI) dan Persatuan Intelektensia Kristen Indonesia (PIKI)<sup>162</sup> Jadi jelaslah sesuai bunyi pernyataan diatas bahwa kedudukan ICMI sama dengan kedudukan cendekiawan agama lain dalam hak dan kewajibannya dalam meningkatkan kualitas SDM Bangsa, walaupun belum final selayaknya upaya positif yang dilakukan ICMI itu untuk sementara dapat dihargai dan menggugurkan isu sektarianisme yang dituduhkan tersebut. Sementara dalam diskusi-diskusi CIDES, sering digelar dengan

162. *Forum*, no. 10, tahun III, 1 September 1994

mengedepankan tema-tema kebangsaan.

Sementara untuk isu Elitisme, dimana ICMI dianggap kurang menyentuh akar problematika kaum lemah, sebagaimana juga diakui juga oleh kalangan ICMI, dengan duduknya Adi Sasono di sekretaris umum pasca muktamar II Jakarta, juga pencanangan program-program yang memihak rakyat kecil, setidaknya bisa sedikit mengobati kekhawatiran itu. Dan hendaknya perlu disadari dan dicermati pula dengan Ainur-Ridho (Husnudzhon) bahwa ICMI pada umur yang tergolong Balita ini masih perlu belajar banyak menghadapi realitas sosial yang menghadangnya. Sementara dengan kepengurusannya yang demikian heterogen ICMI masih perlu terus-menerus mengadakan konsolidasi untuk memperkokoh pijak bangunannya, dan secara arif perlu kita renungkan makna ucapan K.H. Mustafa Bisri "Mustahil ICMI bisaenuhi semua keinginan Ummat" sebagaimana termaktub diatas.

Last but not least, tanggapan terhadap ICMI dari elite masyarakat Indonesia yang dirasa penulis amat fundamental dan perlu mendapat porsi cukup untuk mengulasnya adalah mengenai **ICMI ditinjau dari perspektif demokratisasi di Indonesia**, dari tema ini muncul tanggapan yang menjurus prasangka yang amat menyudutkan ICMI. Yaitu dikhawatirkan keberadaan ICMI justru menghambat bangkitnya *Civil Society* yang secara kultural telah dirintis para cendekiawan Indonesia sejak munculnya kesadaran akan kuatnya hegemoni negara terhadap ummat (rakyat).

Dalam hal ini tampak ada semacam kebutuhan yang

memobilisasi kekuatan umat islam lewat ICMI. Yang ditakuti dan dicurigai adalah jika mobilisasi kekuatan para cendekiawan islam itu dilakukan dalam rangka mencari kekuatan untuk mempertahankan status quo, menjungkirkan kekuatan pro pembaharuan (demokrasi), dan ingin memonopoli politik dengan cara menguasai atau mengendalikan pranata-pranata kenegaraan yang ada. Yang lebih ditakutkan lagi, jika kekuatan islam (ICMI) memosisikan dirinya sebagai kekuatan yang menyokong institusi-institusi politik hegemoni negara itu.

Kekhawatiran itu muncul sebab menurut kaca pandang mereka ICMI selama setengah dasawarsa pertama nampak bukan sebagai sosok yang independen namun justru terlihat terkooptasi oleh negara. Bukti-bukti yang memperkuat pesimisme itu antara lain: Dalam komposisi kependurusan ICMI banyak tokoh-tokoh birokrat terlibat didalamnya, termasuk tokoh-tokoh Golkar, bahkan Pak Harto muncul sebagai pelindung tunggal ICMI; Kedua, tampilnya para tokoh ICMI menghidupkan Kabinet Pembangunan VI dan Senayan; Ketiga, Organisasi ini tidak sensitif terhadap prakarsa dari luar negara sehingga yang nampak hanya sikap pasif terhadap pembredialan Tempo, Editor dan Detik (majalah yang tergolong vokal) pada pertengahan 1994. Keempat, gamangnya ICMI saat menghadapi problematika masyarakat kelas bawah tatkala bersinggungan dengan kebijakan politik pemerintah, kegamangan ini menunjukkan lemahnya fungsionaris ICMI dalam meramban problematika akar demokrasi.

Dengan terintegrasinya kekuatan politik Islam (ICMI) dengan negara tersebut menimbulkan tanggapan beragam. Fachry Ali diantaranya menanggapi dengan tulisan: "Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia".<sup>1</sup> Dia berpendapat, penyatuan tak resmi itu mempunyai segi positif yaitu umat Islam tidak lagi merasa diperlukan sebagai "*The Cats with ringworm*" (kucing-kucing kurap), sebagaimana dikeluhkan Natsir diawal orde baru. Pada saat diperlukan Islam politik dimanfaatkan menumpas komunisme, dan pada saat tidak diperlukan maka dipinggirkan.

Namun dibagian akhir tulisannya, Fachry memaparkan "biaya" yang juga harus ditanggung oleh ICMI, bukan pada analisis tapi pada simpulan tulisan, yang memancing debat.

Fachry berpendapat, dengan hasil pembangunan ekonomi orde baru yang mencengangkan, Indonesia berkesempatan mengembangkan basis *Civil Society* yang relatif kuat. Kita tahu, terbentuknya kekuatan masyarakat yang tidak terkooperasi oleh pemerintah merupakan pilar demokrasi.

Islam yang massanya sangat besar, sangat potensial berkembang menjadai *Civil society*". Tapi simpul Fachry, proses institusionalisasi tak resmi dari penyatuan Islam dengan negara, telah menutup proses tersebut. Proses yang telah memberi janji bagi Indonesia untuk lebih demokratis.

Sikap serupa dengan Fachry ini didukung oleh seba-

---

163. Nasrullah ali fauzi (ed.), *Op-Cit*, hal. 126-144

gian mereka yang termasuk dalam kategori kedua dan ketiga dalam klasifikasi tanggapan masyarakat terhadap ICMI diatas.

Demokrasi dalam alam politik indonesia merupakan wacana ideal yang dirindukan setiap orang yang memahami dan mau mengerti problematika kerakyatan. Diskursus publik mengenai demokrasi ini terus menerus dikembangkan setelah disadari bahwa alam demokrasi itu tidak bisa terwujud dengan prasyarat formalitas saja, sementara secara substansial prasyarat-prasyarat mendasarnya belum dibangun dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan politik.

Benny K. Harman, dalam tulisannya berjudul: "ICMI dan Demokrasi di Indonesia".<sup>1</sup> Menggambarkan realitas demokrasi sebagai berikut: Pertama, kehidupan perpolitikan di indonesia masih sangat jauh dari praktek demokrasi, seperti yang dilaksanakan di negara-negara demokratis. Kedua, demokrasi, bagaimanapun, merupakan sarana untuk mencapai tujuan masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana diamanatkan dalam bagian pembukaan UUD 1945. Hal ini perlu digaris bawahi, karena cita-cita masyarakat adil dan makmur serta negara kedaulatan rakyat tidak akan tercapai bila tidak ada demokrasi.

Jadi, pada dasarnya cita-cita essensiil bangsa Indonesia untuk membentuk negara berkedaulatan rakyat, berbentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

---

164. I b i d, hal. 161

rakyat akan tampil dalam wujud riilnya bila konsep demokrasi nyata dilaksanakan dinegeri ini. Maka tidak heran diskursus ini selalu dirindukan dan isu-isunya tergolong sensitif.

Proses demokratisasi di Indonesia menurut Aswab Mahasin bisa dinisbahkan pada model Alvin Gouldner.<sup>1</sup> Dia mengambil sampel masyarakat Eropa era revolusi Prancis. Disana kelas baru yang bangkit menopang perubahan bukannya kaum borjuasi sebagaimana dibelahan Eropa lain, melainkan kaum cendekiawan. Kelas ini muncul ketika pengetahuan dan kepakaran mulai dihargai sebagai aset. Sehingga, secara sosial, ekonomi maupun politik mereka lantas memiliki pengaruh dan posisi tawar tersendiri berhadapan dengan pemilik modal lain. Maka, atas dasar penguasaan pengetahuan dan wilayah kepakarannya, Gouldner lantas menemukan dua puak cendekiawan, yang disebutnya "*Technical intelligensia*" dan "*Humanist intelektual*".

Kebangkitan kelas baru semacam itu terdapat pula dalam khazanah historis bangsa Indonesia. Puak pertama disebut dengan teknokrat, sedangkan kedua dikenal dengan cendekiawan. Secara kultural kedua kelompok ini diharapkan mampu membangkitkan kekuatan civil society sehingga memiliki posisi tawar yang kuat mengurangi hegemoni negara dan mewujudkan cita-cita demokrasi.

Bila yang terjadi saat ini justru kedua kelompok ini

---

165. *I b i d* , hal. 58

menyatu dalam wadah ICMI yang integratif dengan negara, memperkuat hegemoni negara atas rakyat, maka dari manalagi cita-cita demokrasi akan dibangun. Pudarnya harapan yang telah lama dirindukan itu, wajar, bila menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan dan counter produktif terhadap ICMI.

Berbeda dengan alasan diatas, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur --penentang ICMI ekstrem-- justru khawatir bila kelompok ICMI modernis berhasil menjadikan ICMI sebagai kekuatan politik independen.<sup>1</sup> Alasannya, ICMI adalah kelompok sektarian dan eksklusif, kelompok seperti ini mempersoalkan diskriminasi atas umat Islam dan menuntut keseimbangan kelompok-kelompok agama diperbaiki, untuk itu mereka membutuhkan bantuan khusus melawan kelompok kristen dan Cina karena umat Islam terbelakang dan bodoh. Mereka merasa bahwa islam berada dalam ancaman modernisasi sehingga peran islam harus diformalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kelompok ini penuh dengan orang-orang yang ambisius yang ingin berpengaruh, sehingga memungkinkan pemerintah memanipulasi islam sebagai alat politik. Dan Gus Dur berkeyakinan bahwa ICMI benar-benar dikuasai oleh orang-orang yang ingin mendirikan negara islam.

Terlepas dari tendensi apa dan atas dasar bukti apa Gus Dur berpendapat dengan ainussu' (membabi buta) seperti itu, penulis lebih berkepentingan untuk memperjelas ungka-

---

166. I b i d, hal. 111

pan tersebut yang berkaitan dengan demokrasi. Gus Dur berpendapat bahwa apabila islam politik tampil menguat ke permukaan secara formal, niscaya; pertama, merudikan islam sebab islam seharusnya dijadikan landasan nilai-nilai moral kemasyarakatan bukan tampilan institusional politik yang justru menimbulkan kontra dengan fihak lain yang efeknya melemahkan sifat dasar islam "Rahmatan Lil alamin". Kedua, akan menghambat demokrasi, sebab dengan menguatnya kelompok islam, akan muncul kekuatan sektarian yang sulit untuk mengembangkan pluralisme (mungkin akibat fanatisme agama yang tinggi) ditengah masyarakat plural bangsa Indonesia. Padahal pluralisme merupakan pilar sentral tegaknya demokrasi. Bila itu yang terjadi niscaya menguatnya posisi tawar Islam politik akan menjadi PR baru bagi upaya demokratisasi di Indonesia.

Dua pandangan bertema sama dengan dualisme alasan yang berbeda diatas, baik yang dilontarkan oleh Fachry maupun Gus Dur cukup menimbulkan debat yang panjang dikalangan masyarakat intelektual --Debat itu dapat kita temukan dalam Majalah Ulumul Qur'an no.1 vol. VI tahun 1995, ataupun beberapa buku yang menyoroti tentang demokratisasi islam Indonesia seperti literatur penulis ini--. Diantara orang-orang yang menolak pandangan pesimis tersebut dapat kita sebutkan nama-nama diluar ICMI seperti Yusril Ihza Mahendra, Denny J.A, Ade Armando, Benny K. Harman dan lain-lain. Sedangkan para tokoh ICMI cenderung bersikap diam konsisten dengan karya nyata menghadapi berbagai goncangan

tersebut, sikap sebagaimana telah kita sebutkan didepan.

Terhadap Fachry, Yusril melihat bahwa kesimpulan yang diambil terlalu menyandar ke Barat, seakan demokrasi dan perkembangannya di Indonesia tidak akan tegak tanpa mengikuti alur kultural Barat. Padahal jika demokrasi ditafsirkan sebagai kultur yakni pendidikan terhadap segala bentuk "feodalisme" dan kecenderungan sewenang-wenang, dan menciptakan suatu tatanan masyarakat egaliter dan berkeadilan, maka doktrin Islam telah menyediakan kerangka itu. Hal inilah nampaknya dilupakan Fachry, bahwa dengan menguatnya Islam niscaya doktrin dan nilai-nilai Islam itu sanggup (bertanggung jawab) menumbuhkan tradisi demokratis dalam masyarakat Indonesia.

Sementara Denny J.A berpendapat bahwa dalam memperjuangkan prinsip demokrasi tak ada masalah apakah sebuah kelompok ingin mengambil jarak, menundukkan diri, ataupun berkolaborasi dengan pemerintah; baik kelompok itu menggunakan panji ideologi sekuler maupun keagamaan. Dalam demokrasi, setiap kelompok dibiarkan mengejar kepentingan kebijakan, termasuk dalam mempengaruhi kebijakan negara. Asalkan cara yang dipergunakan masih dalam mekanisme dan prosedur demokrasi. Seperti sukarela, lobby, negosiasi, bargaining dan kolaborasi, tanpa kekerasan.

Kedua pandangan diatas rasanya cukup jelas, dengan demikian kekhawatiran Fachry sudah terjawab. Kronologinya, hendaknya kita tidak terlalu terpaku pada terminologi proses demokrasi ala Barat, dan perlu diyakini bahwa dalam

Islam ada doktrin yang mendorong terwujudnya demokrasi (lihat konsep demokrasi universal versi Kuntowijoyo pada bab III tulisan ini), jadi jangan khawatir bila Islam menguat demokrasi akan tertutup. Selain itu bahwa merealisasikan demokrasi tidak harus berhadapan dengan pemerintah namun bisa juga integratif yang pada prinsipnya bagaimana alam demokrasi itu terealisasi. Dan perlu disadari saat ini masih dalam proses.

Tema bahwa ICMI terkooptasi oleh negara yang menjadi pangkal permasalahan disini, sebenarnya validitasnya masih juga bermasalah, belum ada jawaban tegas apakah memang begitu atau malah sebaliknya. Mengingat para tokoh birokrat yang duduk di ICMI selaku pribadi-pribadi, dan perilaku politiknyapun masing-masing tidak mengatas namakan ICMI. Sementara dalam anatomi tubuh kependurusan ICMI terdapat pula tokoh-tokoh independen yang memiliki komitmen tinggi terhadap demokrasi dan pluralisme Indonesia dan tidak gampang dijadikan alat, tercatat nama-nama seperti Adi Sasono, Dewi Fortuna Anwar, Nurkholish Madjid, Marwah Daud, Sucipto Wirosardjono dan lain-lain. Jadi masalah yang dilandasi keraguan akan berbuntut keraguan pula.

Sementara itu pada saat Fachry diwawancarai oleh Ade Armando, dia berulang kali menyebut kepercayaan yang tinggi terhadap banyak tokoh intelektual Islam yang tergabung dan memiliki posisi cukup strategis di ICMI. Menurut Armando Formulasi tanggapan Fachry yang sangat skeptis itu dipilih-

nya lebih dalam rangka menggugah perhatian.<sup>1</sup>

Terhadap Abdurrahman Wahid, sebagian kekhawatirannya lemahnya pluralisme dengan menguatnya Islam politik sudah terjawab diatas. Bila hal itu masih dirasa berat, nampaknya Gus Dur perlu lebih menyelami universalitas doktrin Islam bersama perangkat tawasshou bil-haq-nya. Selain juga hendaknya Gus Dur tidak menafikan realitas historis Islam politik di Indonesia.

Mahendra menegaskan bahwa khazanah doktrin Islam mengandung unsur politik yang setiap saat dapat muncul atau dimunculkan merespon dinamika masyarakat sekitar dan ketidakadilan yang ada. Apakah kemunculan "Islam Politik" --seandainya benar apa yang dikhawatirkan Gus Dur-- akan menimbulkan dominasi baru Islam atas non Islam ?

Mahendra meyakini bahwa dilihat dari segi doktrin dan implementasinya dalam tradisi politik Islam Indonesia, dipercaya bahwa mayoritas politik Islam Indonesia adalah pendukung demokrasi yang gigih dan sadar pluralitas masyarakat. Apabilapun ada kekuatan Islam ekstrem, namun kekuatan itu selamanya marginal dan selalu dihadapi oleh kekuatan Islam sendiri, yakni Islam demokratis. Terbukti dalam sejarah, Kabinet Sukimanlah --sebuah Kabinet yang dipimpin oleh Masyumi sebagai kekuatan Islam demokratis-- yang pertama kali mengerahkan kekuatan militer untuk menggempur basis Darul Islam Kartosuwiryo, sebagai contoh par excel-

---

167. I b i d, hal. 155

lence dari kekuatan Islam ekstrem yang non demokratis di Indonesia.

Sikap pesimis Gus Dur dalam pernyataan diatas semakin memperkuat pernyataan Hefner, bahwa semangat nasional nampaknya lebih kuat ketimbang ide masyarakat "Islami",<sup>1</sup> Dari sini bisa dipetakan dimana sebenarnya Gus Dur menempatkan diri dalam dinamika Islam Indonesia. Sehingga kita tidak merasa asing bila mendapati sikap yang selalu kontroversial dan curiga terhadap fenomena-fenomena munculnya kekuatan baru yang menurutnya akan berkembang menjadi kekuatan dominan di Indonesia. Walaupun terhadap ICMI belum terdapat bukti yang meyakinkan yang mengarah pada pembentukan kekuatan Islam politik formal (sebagaimana kita bahas di Bab terdahulu).

Terlepas dari apa maksud Gus Dur dibalik sikap apriori terhadap ICMI itu, menurut hemat penulis, hendaknya Gus Dur yang secara formal berperan sebagai lokomotif pembawa gerbong Ummat, yang selalu dijadikan panutan seluruh warga NU, tidak menempatkan diri bertentangan secara terbuka dengan pihak lain, apalagi melontarkan pandangan-pandangan yang bisa menyesatkan ummatnya. Sehingga saat Gus Dur menentang ICMI yang nampak dimata masyarakat seakan NU bertentangan dengan ICMI. Hal ini akan membawa energi ummat Islam secara keseluruhan mubadzir mengurus perpecahan yang seharusnya tidak terjadi.

---

Sedangkan yang paling penting dilakukan adalah bukannya memotong dan membongkar akar ICMI yang belum jelas salahnya itu, melainkan memberikan kritik membangun bermuatan pesan konsep ideal, dan mengamati langkah ICMI serta meresponnya dengan Tawasshou bil-haq demi terwujudnya demokrasi yang bermanfaat bagi ummat dan Bangsa Indonesia.